

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2030

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak, diperlukan perencanaan yang sistematis melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2030;
b. bahwa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai bagian dari penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Gampong Layak Anak adalah gampong yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

BAB II
PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 2

(1) RAD KLA Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
(2) Prinsip penyusunan RAD KLA dilaksanakan berdasarkan:
    a. afirmatif, yaitu kebijakan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar anak memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama;

b. non diskriminasi, yaitu pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
d. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
e. hak untuk hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup semaksimal mungkin;
f. hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak, adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
g. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

(1) Penyusunan RAD KLA Tahun 2025-2030 diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:
a. kelembagaan;
b. hak sipil dan kebebasan;
c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
f. perlindungan khusus; dan
g. kecamatan dan gampong layak anak.

(2) RAD KLA Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 12 Desember 2025 M
21 Djumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Diundangkan di Idi
pada tanggal 12 Desember 2025 M
21 Djumadil Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ADLINSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2030

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2030

Dalam rangka pencapaian sasaran KLA, diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Penyusunan RAD KLA mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam menyusun RAD KLA, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melakukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan perangkat daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA di Kabupaten Aceh Timur.

RAD KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui indikator, yaitu:

1. peraturan daerah tentang KLA;
2. penguatan kelembagaan KLA;
3. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
4. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
5. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA);
6. pelembagaan partisipasi anak;
7. pencegahan perkawinan anak;
8. penguatan kapasitas lembaga konsultasibpenyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
10. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif;
11. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik;
12. persalinan di fasilitas kesehatan;
13. status gizi balita;
14. Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
15. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
16. lingkungan sehat;
17. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok;
18. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
19. Sekolah Ramah Anak (SRA);
20. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak;
21. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;

22. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);
23. pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS;
24. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
25. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
26. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
27. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); dan
28. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Tujuan penyusunan RAD KLA yaitu dalam rangka pengembangan KLA dan untuk membangun inisiatif Pemerintahan Daerah khususnya di Kabupaten Aceh Timur yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Aceh Timur. Selain itu tujuan disusunnya RAD-KLA yaitu:

1. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kabupaten Aceh Timur dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
2. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
3. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Aceh Timur yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, perangkat daerah, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya.

Guna mendukung keberlanjutan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Aceh Timur, maka ditetapkan target peningkatan melalui matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2030

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
I	KLASTER KELEMBAGAAN										
1	Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Fasilitasi Penyusunan Perda tentang KLA (Evaluasi Raperda)	Regulasi Perda	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DPRK
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah GT KLA Aktif	Kabupaten (*Pembaruan SK)	1	1	1	1	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KECAMATAN KEUCHIK BAGIAN HUKUM Ketentuan: a. SK Bupati GT-KLA Kabupaten b. SK Camat GT-KLA Kecamatan-15 c. SK Keuchik GT KLA Desa198 d. SK Keuchik GT KLA Gampong-8
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah perangkat daerah yang memiliki RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	14	14	18	18	18	18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Koordinasi Kabupaten Layak Anak	Jumlah perangkat daerah yang melakukan evaluasi KLA	Gugus Tugas KLA (Rakor)	14	14	14	14	14	14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
			Evaluasi KLA tingkat kecamatan dan gampong		24	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi penyusunan rancangan akhir RKPD	Jumlah dinas yang menyusun RKPD (Isu Pengarusutamaan Hak Anak)	Kabupaten	14	14	14	14	14	14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pembinaan dan pengawasan pembentukan UPTD PPA	Jumlah perangkat daerah yang membentuk UPTD PPA	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyusunan rencana kerja dinas bidang perlindungan anak	Jumlah dokumen rencana kerja dinas	Dokumen	1	1	1	1	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan anak	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	Dokumen	3	3	4	4	5	6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelaksanaan kajian bidang perlindungan anak	Jumlah dokumen kajian	Dokumen	2	2	2	2	3	3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Fasilitasi pembaharuan profil KLA	Jumlah perangkat daerah yang memiliki profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi Anak (KGPPA) pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	Kabupaten	1	2	3	4	5	6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi TOT fasilitator KLA (DIKLAT)	Kegiatan TOT fasilitator	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket Leaflet Poster Banner Buku Saku Baliho Video Medsos							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kecamatan layak anak dan gampong layak anak	Jumlah Kecamatan Jumlah Gampong	Kecamatan Gampong	24 16	24 24	24 100	24 200	24 400	24 513	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN GAMPONG Kriteria Kecamatan Layak Anak meliputi: a. Tersedia kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak. b. Tersedia data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya. c. Forum Anak Kecamatan aktif dan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan. d. Tersedia kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya. e. Forum anak kecamatan berperan sebagai 2P. f. Tersedia mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak. g. Persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten.

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
											h. Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir. i. Tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir. j. Semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal. k. Tersedia ruang baca anak/layanan Informasi Layak Anak (ILA),termasuk ketersediaan di ruang publik. l. Tersedia kelompok konsultasi keluarga. m. Ruang publik bebas asap rokok. n. Ada layanan PAUD-HI. o. Ada Puskesmas dengan pelayanan ramah anak. p. Ada ruang/taman bermain bagi anak. Kriteria Gampong Layak Anak meliputi: a. Tersedia kebijakan/Qanun Gampong tentang Perlindungan Anak. b. Tersedia data/profil anak gampong yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya.

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
											c. Forum Anak Gampong aktif dan terlihat dalam Musrenbang gampong. d. Tersedia kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya. e. Forum anak gampong berperan sebagai 2P. f. Persentase anak mendapat kan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten. g. Tidak perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir. h. Tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir. i. Semua anak mendapat Pendidikan formal/nonformal. j. Tersedia Ruang baca anak, layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediannya ILA diruang publik. k. Tersedianya kelompok konsultasi keluarga. l. Tersedianya ruang publik bebas asap rokok. m. Tersedianya layanan PAUD-HI. n. Tersedianya ruang/taman bermain bagi anak.

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Penyusunan panduan kapasitas fasilitasi pemberdayaan anak di gampong	Jumlah dokumen panduan fasilitasi pemberdayaan Anak di gampong	Dokumen	1	20	40	60	80	120	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Gampong (Gampong Ramah Anak)	Jumlah gampong yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan anak di gampong	Kecamatan Gampong	16	20	40	60	80	120	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KECAMATAN GAMPONG
		Pelatihan bagi SDMPATBM tentang perlindungan anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media *online*	Jumlah PATBM tingkat gampong	SK Keuchik Penetapan PATBM-Gampong	1	20	80	140	200	260	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KECAMATAN GAMPONG
			Jumlah PATBM tingkat gampong	SK.Keuchik Penetapan PATBM-Gampong	-	1	1	1	1	1	
			Jumlah SDM PATBM yang terlatih perlindungan anak	Orang	30	60	120	180	240	300	

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
3	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di daerah	Jumlah APSAI aktif	Kabupaten	-	1	2	3	4	5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU FORUM CSR KAB. ACEH TIMUR
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	SDM Lembaga	553	854	1155	2006	2307	2658	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi Penguatan Peran PKK melalui10 Program Pokok PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang,	Jumlah Program/ Panduan 10 Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program gampong layak anak meliputi:	Dokumen Laporan	524	1024	1524	2024	2524	3024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG TP-PKK

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)	a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila b. Gotong royong c. Pendidikan dan keterampilan d. Pengembangan kehidupan berkoperasi e. Pangan f. Perumahan dan Tata laksana rumah tangga g. Kesehatan h. Kelestarian lingkungan hidup i. Perencanaan sehat	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan							
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) di daerah	Jumlah JMPA aktif	Kabupaten	16	28	54	68	88	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK MEDIA SOSIAL

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	3	5	6	7	8	9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK MEDIA SOSIAL
		Fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA jumlah lembaga keagamaan	Kegiatan/SDM Lembaga yang terlibat	39	44	48	51	55	60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ORMAS KEAGAMAAN
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	a. MoU/Kegiatan/ SDM lembaga yang terlibat di dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur	51,706	55%	60%	70%	80%	90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PERGURUAN TINGGI

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
				b. MoU/Kegiatan/ SDM lembaga yang terlibat diluar wilayah Kabupaten Aceh Timur c. Kegiatan fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset							
		Fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Kabupaten	1	4	12	18	22	35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN										
1	Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	% Kecamatan Gampong	96,09%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah kecamatan yang menerapkan KIA	Kecamatan % Jumlah	55,79%	75%	95%	100%	100%	100%	
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kecamatan yang tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang arnan, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	Kata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Penyebaran infomasi layak anak	Jumlah konten informasi layak anak yang tersebar melalui forum anak	Eksemplar (Produk Konten cetak, digital)	±20 eksemplar	30	40	50	60	70	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah kecamatan yang terpapar informasi layak anak melalui media *abous theline* dan *through the line*	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	
			Jumlah sosialisasi informasi layak anak melalui media *below the line*	Kegiatan	±15	21	24	30	41	53	
		Fasilitasi pemenuhan hak anak atas Informasi Layak Anak (ILA)	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten Kecamatan	1 5	4 8	6 9	8 11	10 12	12 15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
3	Perpustakaan yang Terakreditasi	Pembinaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten) memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Jumlah Sekolah	2	10	20	31	40	50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Nilai Budaya Kegemaran membaca	Mengadakan kegiatan lomba minat baca (bertutur, duta baca dsb)	Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Jumlah Kegiatan	5	10	15	20	25	30	
5	Jumlah Penerima manfaat	Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan sosialisasi	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah Peserta	27	35	70	150	200	250	
		Melaksanakan Kegiatan pelatihan	Layanan perpustakaan berbasis inklusi	Jumlah Peserta	-	30	60	90	120	150	
		Sosialisasi ke masyarakat	Jumlah pojok baca digital area publik di Kabupaten	Jumlah Pojok Baca	3	6	8	10	12	15	

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
6	Pelembagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan Kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif	Kabupaten Kecamatan	22 5	25 10	30 39	35 48	40 48	50 48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor(2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA sebagai 2P	Kecamatan	5	15	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelatihan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	Jumlah daerah yang menerapkan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kabupaten Kecamatan	1 5	4 6	6 12	8 18	9 21	11 24	
		Fasilitasi penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah daerah yang memiliki Fasilitator Forum Anak terlatih	Kabupaten Kecamatan	1 5	4 6	6 12	8 18	9 21	11 24	
		Fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	
		Fasilitasi peningkatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan Pembangunan (PAPP)	Jumlah FA terlibat aktif dalam Musrenbang	Forum Anak Kabupaten Kecamatan	1 2	1 5	1 10	1 15	1 16	1 24	

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
1	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan perkawinan anak	Persentase perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%	2,62%	2%%	1.90%	1.80%	1.70%	1.50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pencegahan perkawinan anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	Kabupaten Kecamatan Gampong	1 5	1 6	1 7	1 9	1 11	1 13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah	Orang (dalam ribuan)	±500 orang	500	600	650	700	800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
		Penurunan angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specifitc Fertilitu Rate* (ASFR15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	36/1000	30/100	28/1000	25/1000	20/1000	10/1000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja	Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	24 Tahun	20 tahun	20 tahun	22 tahun	23 tahun	23 tahun	24 tahun	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan (dalam ribuan)	0,5 ribu	0,5 ribu	0,5 ribu	0,6 ribu	0,7 ribu	0,8 ribu	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
2	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan (dalam ribuan)	0,5 ribu	0,5 ribu	0,5 ribu	0,6 ribu	0,7 ribu	0,8 ribu	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) di kabupaten yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	1	1	1	1	1	1	DINAS SOSIAL

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Fasilitasi pembinaan Keluarga balita dan anak	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah keluarga yang memiliki balita pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan *stunting*	Keluarga	75%	75%	80%	85%	90%	90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	%	70%	70%	75%	80%	85%	90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	1000/KK	1000	1000	1500	2000	3000	DINAS SOSIAL
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	65%	65%	70%	70%	80%	90%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	70%	70%	75%	80%	85%	90%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	300	300	500	1000	1500	2000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	2	3	3	3	3	3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	2	3	3	3	3	3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Jumlah satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Jumlah	115	118	123	127	133	145	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Jumlah	75	78	80	82	85	90	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang	50	55	60	63	67	70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	7	10	10	10	10	11	DINAS SOSIAL
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	1	4	6	7	8	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelaksanaan standarisasi *day care* ramah anak	Jumlah daerah yang mengembangkan *daycare* ramah anak	Kabupaten Kecamatan	1	4	6	7	8	9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati	Jumlah daerah yang membentuk pesantren ramah Anak	Kabupaten Kecamatan	7	8	9	12	15	17	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
			Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	7	8	9	1	10	15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
			Jumlah model pesantren ramah anak	Model Pesantren	7	8	10	12	13	15	
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan anak berbasis hak anak	Pengasuh Pesantren	21	25	26	27	28	30	
5	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas lingkungan ramah anak	Kabupaten	7	9	10	11	13	15	DINAS PERHUBUNGAN
			Pekan nasional keselamatan jalan	Kabupaten	7	8	9	11	13	15	DINAS PERHUBUNGAN

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2025)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah anak	Jumlah daerah yang difasilitasi transportasi angkutan umum massal ramah anak	Kabupaten	3	4	4	4	4	8	
			Trayek angkutan massal	Trayek	2	3	4	4	4	4	
			Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	13	14	15	16	17	18	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi	5	5	5	8	9	10	
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk di kabupaten	Lokasi	5	5	5	5	5	5	DINAS PERHUBUNGAN
			Shelter	Jumlah	5	5	5	6	7	8	
			Halte	Jumlah	3	3	3	3	3	3	
			APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	Lokasi	7	7	7	7	7	7	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
1	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Persentase persalinan difasilitas pelayanan kesehatan	%	87	90	90	95	100	100	DINAS KESEHATAN TP-PKK
			Persentase kunjungan neonatal	%	97,13	100	100	100	100	100	
		Skrining deteksi dini pra persalinan	Cakupan ibu hamil diskrining hepatitis B	%	70,8%	80%	80%	90%	95%	100%	
2	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan VITAMIN A	%	93,7	95%	95%	100%	100%	100%	
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	91%	95%	95%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam gizi	Jumlah FA kecamatan yang mendapatkan pengetahuan 2P gizi melalui Sosialisasi	FA	3	4	4	4	5	5	DINAS KESEHATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TP-PKK
		Pelatihan bagi forum keluarga dalam 2P gizi	Jumlah FK kecamatan yang mendapatkan pengetahuan 2P gizi melalui sosialisasi	FK	2	3	3	4	4	4	
3	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	62,4	70	70	80	90	100	
		Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif dan gizi anak	Jumlah kelompok pendamping ASI yang difasilitasi pengetahuan ASI eksklusif	Kelompok	25	30	35	40	40	40	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
4	Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah anak difasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar utama	Jumlah	4	10	15	18	20	24	DINAS KESEHATAN TP-PKK
			Jumlah rumah sakit terakreditasi paripurna	Jumlah	0	0	0	0	0	0	
		Pelayanan kesehatan anak	Jumlah gampong yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)	125	150	200	280	300	513	
		Pelayanan kesehatan bayi/anak dari ibu terinfeksi HIV, dan Sifilis	Persentase gampong mampu profilaksis	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke anak	Persentase bayi lahir dan Ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan HBIig kurang dari <24 jam setelah kelahiran	%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	3,2%	2%	2.5%	3%	1,7%	1%	
		Kasus kusta anak	Jumlah kasus kusta anak	Jumlah Absolut	0	0	0	0	0	0	
		Pelayanan deteksi dini anak dengan pneumonia	Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana standar pneumonia	%	81,5%						
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	80%						
		Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	%	78,6%						
		Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggara kan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	%	81.5%						

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Fasilitasi pelayanan ramah anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah anak	Puskesmas	24	24	24	24	24	24	
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pelayanan ramah anak	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	DINAS KESEHATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang							DINAS KESEHATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses Air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya kabupaten sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya Sesuai standar	%	68%	70%	70%	80%	90%	100%	DINAS KESEHATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERUMDA AIR MINUM TIRTA PEUSADA
			Persentase gampong dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	54%	70%	80%	90%	100%	100%	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Profil Kabupaten Sehat (apakah pakai indikator strata atau hanya laporan profil)	Kabupaten							
			Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%							
			Persentase Tempat dan FASILITAS Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuaistandar	%							
		Promosi kesehatan	Presentase Posyandu aktif	%							
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan Rumah	1.950	1.950	2000	2000	2000	2000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERUMDA AIR MINUM TIRTA PEUSADA

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	300/liter	300	320	320	320	320	
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	350/liter	350	350	350	350	350	
			Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	7.000 SR	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000	
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	Km	350	350	350	350	400	400	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	Kepala Keluarga	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sosialisasi bagi SDM forum keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga	300 orang	300	300	300	350	400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Implementasi KTR	Kecamatan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi anak sebagai 2P	Jumlah FA Kecamatan yang mendapatkan pengetahuan 2P Hebat Tanpa Rokok melalui sosialisasi	Forum Anak	24	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN FORUM ANAK KECAMATAN
		Sosialisasi bagi SDM forum keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM forum keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga	300	300	300	350	350	350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA										
1	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	Angka	60%	60%	60%	65%	60%	60%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ sederajat	Angka	95%	95%	95%	95%	95%	100%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB /sederajat	Angka	92%	92%	95%	95%	95%	95%	
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/BA (5-6 tahun)	%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	
			Sosialisasi Sekolah inklusi	Sekolah	40	45	45	50	50	50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL
			Pengembangan sekolah-sekolah inklusi	Sekolah	40	45	45	50	50	50	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa miskin yang memperoleh bantuan	Orang	45000±	45000±	45000±	45000±	45000±	45000±	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang menerima bantuan pendidikan	Orang	23000±	23000±	23000±	23000±	23000±	25000±	
		Jumlah sekolah dengan siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Sekolah	Angka	375	375	375	375	3755	400	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
2	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA disetiap jenjang pendidikan	Jumlah madrasah yang ramah anak	Madrasah	180	180	180	180	200	300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
			Jumlah MA yang ramah anak	Madrasah	180	180	180	180	200	300	
			Jumlah SRA yang sudah di SK kan	Sekolah	118	118	118	118	200	200	
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	PAUD.TK.RA /SD/MI/ MTs/SMA/ MA/SMK/	-PAUD= 40 -TK= 41 -SD= 79 -MI= 12 -MTS= 9 -SMA= 13 -SMK= 6	+	+	+	+	+	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	Sekolah	118	118	118	200	200	250	
			Sekolah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya anak	Sekolah	750	750	800	800	800	±950	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan	25	25	25	25	30	30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka	%	80%	80%	80%	80%	90%	90%	
		intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan pangan jajan anak sekolah	Sekolah	72%	80%	85%	90%	95%	100%	DINAS KESEHATAN DINAS KETAHAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BPOM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan pangan jajan anak sekolah	Sekolah	53	70	75	85	95	100	DINAS KESEHATAN DINAS KETAHAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BPOM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Madrasah	20	40	60	80	90	100	
		Intervensi keamanan pangan Di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%	20%	45%	65%	85%	95%	100%	DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
			Tersedianya kantin sehat di madrasah	Lokasi	20	40	60	80	100	100	
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah sekolah yang melaksanakan sosialisasi pencegahan narkoba	Sekolah	250	250	250	270	280	300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BNN

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	950	950	950	950	950	950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah madrasah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri)	Madrasah	315	315	315	315	315	315	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah gampong/ kecamatan yang menerapkan SPAB	Kabupaten	188	188	200	220	300	315	BPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
3	Ketersediaan Fasilitas Untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif	Orang	±300	300	350	400	400	500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Peningkatan kesehatan reproduksi dikalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	±300	300	350	400	400	500	DINAS KESEHATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Kegiatan kreatifitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Pojok Baca Digital	10	20	30	40	50	60	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	6	20	25	30	40	50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS										
21.	Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KEPOLISIAN
			Jumlah kecamatan/ gampong yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan anak	Kecamatan /Gampong	24 16	24 50	15 200	24 300	24 400	24 513	KECAMATAN GAMPONG
			Jumlah kecamatan/ gampong yang diadvokasi tentang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan /Gampong	24 16	24 29	24 50	24 90	24 200	24 513	KECAMATAN GAMPONG
			Jumlah daerah yang dilatih tentang disiplin positif	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	BAGIAN HUKUM

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Jumlah zonasi yang dibuat untuk internet anak	Kabupaten	1	2	3	4	5	6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah gampong yang mencanangkan gampong tanpa kekerasan	Gampong	1	113	200	300	400	513	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG GAMPONG
			Jumlah kecamatan/ gampong yang mempunyai/ mengembangkan sIstem monitoring dan evaluasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan/ Gampong	24 16	24 20	24 60	24 70	24 80	24 512	KECAMATAN GAMPONG
			Jumlah daerah yang mempunyai ketersediaan SDM dan/sarana (Molin) yang memadai untuk layanan anak korban kekerasan dan penelantaran	Kabupaten	1	2	2	2	2	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA FORUM ANAK

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
			Jumlah yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Kecamatan	320	320	350	350	350	400	
			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam penyusunan profil anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kecamatan	2	5	10	15	20	24	
		Pelatihan bagi lembaga layanan penaganan anak korban kekerasan	Jumlah daerah yang memiliki lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
			Standar layanan bagi anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KEPOLISIAN
			Jumlah SDM unit layanan telah dilatih managemen kasus	Orang	6	10	13	16	20	20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KEPOLISIAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNGJAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah daerah yang tersosialisasi sadar wisata dan sapta pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya	Titik Daerah	0	0	0	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Jumlah daerah yang tersosialisasikan pembebasan anak dari eksploitasi	Kecamatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan anak dari eksploitasi	Gampong	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	2	3	3	3	3	3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Pencegahan Perlukaan Pada Genital Perempuan (P2GPJ)	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan sunat anak perempuan	Kecamatan	-	5	10	15	20	24	DINAS KESEHATAN
			Jumlah remaja yang difasilitasi pencegahan sunat anak perempuan	Orang	-	5	10	15	20	24	DINAS KESEHATAN
			Jumlah tokoh agama yang difasilitasi pencegahan sunat anak perempuan	Orang	-	5	10	15	20	24	DINAS KESEHATAN
			Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat anak perempuan	Orang	-	5	10	15	20	24	DINAS KESEHATAN
			Jumlah tokoh masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat anak perempuan	Orang	-	5	10	15	20	24	DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Pelatihan dan kampanye pencegahan sunat anak perempuan	Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat anak perempuan	Orang	-	5	10	15	20	24	DINAS KESEHATAN
			Jumlah tokoh masyarakat yang dilatih pencegahan sunat anak perempuan	Orang	-	5	10	15	20	24	DINAS KESEHATAN
			Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat anak perempuan	Orang	-	5	10	15	20	24	DINAS KESEHATAN
22.	Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Jumlah pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	-	10	20	30	40	50	DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah forum koordinasi pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	Anak	-	1	2	3	4	5	DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah zona bebas pekerja anak	Kecamatan	-	5	10	15	20	24	DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pengintegrasian isu pekerja anak	Jumlah yang mengintegrasikan isu pekerja Anak kedalam lndikator Kinerja Pemerintah Daerah	Kecamatan	-	5	10	15	20	24	DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penanganan kasus pekerja anak	Pekerja anak yang terlindungi hak-haknya sesuai konvensi hak anak	Kasus	-	52	40	36	21	0	DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEPOLISIAN
		Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja anak	Perusahaan	-	3	5	10	15	20	DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
23.	Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/ AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan NAPZA anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial	Anak	5	2	2	2	2	1	DINAS SOSIAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KESEHATAN BNN
			Jumlah anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi difasilitas rehabilitasi milik BNN	Orang	30	5	3	3	2	1	BNN
		Sosialisasi internet aman untuk anak (teman anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah anak yang mendapat sosialisasi internet aman untuk anak (teman anak) didaerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Kecamatan	400/kec	400/kec	500/kec	500/kec	500/kec	550/kec	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah gampong pencegahan bebas pornografi	Gampong	120	123	200	300	400	513	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG GAMPONG

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
24.	Pelayanan bagi ANAK KORBAN BENCANA DAN KONFLIK	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	±35/Thn	35	36	37	38	40	DINAS SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
		Fasilitasi gampong tangguh bencana	Jumlah gampong tangguh bencana yang dikembangkan	Gampong	20	20	20	30	40	50	
		Perlindungan sosial bagi anak korban bencana	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	20.000	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Kecamatan	7	8	10	5	4	1	DINAS SOSIAL
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik anak tentang perlindungan anak dari bencana	Orang	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.500	DINAS SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	%	50%	60%	70%	70%	80%	100%	DINAS SOSIAL
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	20	25	25	25	30	35	DINAS SOSIAL
		Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS LINGKUNGA HIDUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah gampong berketahanan iklim	Gampong	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH GAMPONG

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
25.	Pelayanan bagi anak disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	1.Jumlah yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak disabilitas	Jumlah kecamatan/ gampong tentang data advokasi	Angka	24	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL
		2.Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Jumlah forum koordinasi yang ada di tingkat kecamatan /gampong	Angka	024	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN GUGUS TUGAS KLA
		3.Jumlah Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)	Jumlah Media KIE	Angka	10	20	30	40	50	60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		4.Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Jumlah lembaga layanan ditingkat kecamatan /gampong	Angka	40	50	60	65	70	80	DINAS SOSIAL

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		5.Jumlah kecamatan /gampong yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	Jumlah kecamatan /gampong	Angka (belum ada kecamatan /gampong	45	45	50	55	55	60	DINAS SOSIAL
26.	Pelayanan bagi anak dengan Perilaku sosial Menyimpang (PSM)	1. Jumlah yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak PSM	Jumlah kecamatan /gampong tentang data advokasi	Angka	24	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan teritorial serta anak PSM	Jumlah forum koordinasi yang ada di tingkat kecamatan/ gampong/	Angka	24	24	24	24	24	24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KECAMATAN GAMPONG

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		3. Jumlah media KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak PSM	Jumlah Media KIE	Angka (belum ada media sampai tahun ini)	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
27..	Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)	1.Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana prasarana yang memadai	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Angka (sampai saat Ini belum ada LPKA)	0	0	0	0	0	0	BAGIAN HUKUM BAPAS DINAS SOSIAL
		2.Presentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi ditingkat penyidikan	Jumlah anak ABH	%	0	0	0	0	0	0	BAPAS KEPOLISIAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		3.Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi anak	Jumlah LPKA	Angka	0	0	0	0	0	0	BAPAS BAGIAN HUKUM DINAS SOSIAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4.Presentase ABH yang memperoleh hak layanan integrasi	Jumlah ABH	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BAGIAN HUKUM DINAS SOSIAL BAPAS
		5.Jumlah LPK yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	Jumlah LPKA	Angka	0	0	0	0	0	0	
		6.Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten	Jumlah LPKS dan RPS ditingkat kecamatan/ gampong	Angka	LPKS = 11 RPS = 1	LPKS = 11 RPS = 1	LPKS = 14 RPS = 1	LPKS = 15 RPS = 1	LPKS = 20 RPS = 1	LPKS = 24 RPS = 1	BAPAS BAGIAN HUKUM
		7.Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan	Angka	1	2	3	4	5	6	BAPAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KEPOLISIAN BAGIAN HUKUM

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		8.Peningkatan kapasitas APH	Jumlah kegiatan (Seminar/Diklat /BIMTEK)	Angka	3	5	7	10	13	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KEPOLISIAN BAGIAN HUKUM
		9.Jumlah lokasi yang memiliki layanan ruang pelayanan khusus (RPK) kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Jumlah lokasi RPK	Angka	4	6	8	10	12	15	KEPOLISIAN
28.	Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmanisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme di Kabupaten	Jumlah kegiatan	Angka (tidak ada anak yang terlibat jaringan terorisme	6	8	8	9	9	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BAGIAN HUKUM DINAS SOSIAL KEPOLISIAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		10. Peningkatan kapasitas APH	Jumlah Kegiatan (Seminar/Diklat/ BIMTEK)	Angka	3	5	7	10	13	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KEPOLISIAN BAGIAN HUKUM
		11. Jumlah lokasi yang memiliki layanan ruang pelayanan khusus (RPK) kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Jumlah lokasi RPK	Angka	4	6	8	10	12	15	KEPOLISIAN
29.	Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmanisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme di kabupaten	Jumlah kegiatan	Angka (tidak ada anak yang terlibat jaringan terorisme	6	8	8	8	8	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BAGIAN HUKUM DINAS SOSIAL KEPOLISIAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2025	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah kecamatan/ gampong yang difasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Jumlah kecamatan/ gampong	Angka (dari 15 kecamatan, ada 13 kecamatan yang sudah melakukan penyuluhan sosialisasi pencegahan terorisme	18	20	19	22	25	30	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KECAMATAN GAMPONG KEPOLISIAN

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002